

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA PERMISAN KECAMATAN JABON

Amelia Juli Fernanda¹, Isna Fitria Agustina²

Fakultas Bisnis, Hukum, Dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
e-mail : isnaagustina@umsida.ac.id, ameliajf36@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program ketahanan pangan dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pada program ketahanan pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian berdasarkan teori Implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III menunjukkan bahwa : 1) Komunikasi, penyampaian informasi kepada para petani melalui kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) atau sosialisasi. 2) Sumber Daya, masih terdapat masalah dalam sumber daya manusianya dimana mayoritas petani sudah berusia lanjut sehingga pengetahuan dan pemahaman mereka terbatas. Pada ketersediaan sumber daya finansial dan sumber daya sarana dan prasarana tidak ada kendala signifikan. 3) Disposisi, belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari manfaat langsung dari program ketahanan pangan bagi masyarakat belum terlihat secara signifikan. Meskipun demikian, para petani bertanggung jawab atas tugas dan tupoksinya masing-masing. 4) Struktur Birokrasi, terdapat SOP yang jelas namun koordinasi antar stakeholder yang terlibat belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat, Program Ketahanan Pangan*

Abstract

The aim of this research is to find out how the food security program is implemented and to find out the problems in the food security program in Permisan Village, Jabon District. This research uses qualitative methods, by conducting observations, interviews and documentation. The results of research based on the Implementation theory put forward by Edwards III show that: 1) Communication, conveying information to farmers through technical guidance

activities (BIMTEK) or socialization. 2) Resources, there are still problems in human resources where the majority of farmers are elderly so their knowledge and understanding is limited. There are no significant obstacles regarding the availability of financial resources and facilities and infrastructure resources. 3) Disposition, it cannot be said to be going well, this can be seen from the direct benefits of the food security program for the community which have not been seen significantly. However, farmers are responsible for their respective duties and main tasks. 4) Bureaucratic structure, there are clear SOPs but coordination between the stakeholders involved has not gone well.

Keywords : *Implementation, Food Security Program, Community Empowerment*

A. PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh seluruh manusia. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan manfaat sosial, terdapat permintaan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan demikian, ketersediaan pangan yang cukup mempunyai dampak yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sosial, politik, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan (Lamingthon, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan, mengatakan bahwa kebutuhan pangan bagi suatu warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah diharuskan menciptakan juga pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman agar terwujud kehidupan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Peran pemerintah disini dalam upaya meningkatkan keanekaragaman pangan dengan menjalankan sebuah program yang dapat dilaksanakan oleh seluruh golongan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah (Fiandana et al., 2020).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi ketahanan pangan dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan, menyatakan bahwa keadaan terpenuhinya pangan bagi

negara hingga individu, hal ini ditandai dengan ketersediaan pangan yang cukup, baik dari jumlahnya maupun mutunya secara terus-menerus. Untuk mencapai ketahanan pangan, kegiatan pertanian pertama-tama harus didasarkan pada penguatan pangan wilayah terkecil daerah perdesaan. Tujuan mendasar pembangunan perdesaan adalah untuk mencapai ketahanan pangan pada suatu wilayah yang sarana dan prasarananya berkaitan dengan ketersediaan, distribusi, dan kondisi pangan yang sesuai untuk menghasilkan pangan yang cukup dan menjamin ketahanan pangan bagi rumah tangga (Tri P, 2016).

Kondisi ketahanan pangan yang kuat dapat dibangun salah satunya dengan memahami permasalahan pada ketahanan pangan itu sendiri. Permasalahan ketahanan pangan dapat dilihat dari empat aspek yang saling berkaitan yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, pemanfaatan pangan, serta kerentanan pangan. Keempat aspek ini saling mempengaruhi satu sama lain. Kemiskinan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan. Tinggi rendahnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap individu, akan berpengaruh pada kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Pendapatan yang rendah juga membatasi pilihan pangan sehingga berdampak pada kualitas gizi dan kesehatan.

Tabel 1. Data Rumah Tangga Miskin Desa Permisan

Tahun	Jumlah KK	Jumlah Rumah Tangga	
		Miskin	Presentase
2022	502	323	64 %
2023	530	315	59 %
2024	538	420	78 %

Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Permisan (2024)

Berdasarkan Tabel 1 Desa Permisan memiliki jumlah rumah tangga miskin yang cukup tinggi. Presentase rumah tangga miskin di Desa Permisan sempat menurun pada tahun 2023 sebanyak 5%, namun naik kembali sebesar 19% pada tahun 2024. Permasalahan kemiskinan

disebabkan oleh rendahnya penghasilan masyarakat yang terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun (Encang Saepudin, Ninis Agustini Damayani, 2018). Kategori miskin di Desa Permisan dilihat dari beberapa poin yaitu a) Pekerjaan, b) Luasan tempat tinggalnya, c) Aset yang dimiliki, d) Jumlah tanggungan. Hal ini yang menjadi perhatian adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan serta keterbatasan sumber daya manusia yang layak untuk mengembangkan aktivitas usaha dalam sumber perolehan pendapatan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di perdesaan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam segala hal. Badan Ketahanan Pangan yang berbasis pendanaan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa menjadi fokus utama program ketahanan pangan itu sendiri.

Menurut Keputusan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di Desa, disebutkan bahwa program ketahanan pangan di Desa merupakan salah satu program sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Desa, selain itu tujuan program ini yaitu untuk menciptakan ketersediaan pangan bagi seluruh warga desa, dan memastikan desa terhindar dari kerawanan ketersediaan pangan (PDDT 2022). Hal ini didasarkan pada tingkat kelaparan Indonesia yang menurut Global Hunger Index (GHI) menempati peringkat ketiga tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2021. Indonesia memperoleh skor indeks sebesar 18 poin atau termasuk dalam level sedang. Skor ini berada di atas rata-rata global sebesar 17,9 poin. GHI menggambarkan situasi kekurangan suatu negara yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu nutrisi dan kebutuhan pangan (Tri Susuilo, 2023).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa telah membuat Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 13 Tahun 2023 tentang panduan operasional yang mengatur penggunaan Dana Desa dalam konteks ketahanan pangan dan hewani di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus utama penggunaan Dana Desa Tahun 2024 berdasarkan Permendes PDDT

Nomor 13 Tahun 2023 adalah penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, program pencegahan dan penurunan stunting, program sektor prioritas di Desa melalui bantuan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, Program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Tabel 2. Kegiatan Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan

No.	Tahun	Kegiatan	Anggaran
1.	2022	Pembangunan Kolam Pancing Milik Desa	Rp. 158.742.000
2.	2023	Pembangunan Saluran Irigasi	Rp. 90.571.000
		Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Gapoktan	Rp. 15.050.000
		Bantuan Bibit Ikan & Pakan Ikan	Rp. 87.650.000
		Pembangunan Rumah Hidroponik	Rp. 7.912.000
3.	2024	Pembangunan Plengseng Saluran Irigasi (Infrastruktur Pangan)	Rp. 151.000.000
		Belanja Obat – Obatani Pengendali Hama	Rp. 4.000.000
		Pemeliharaan Kolam	Rp. 10.000.000
		Pemeliharaan Irigasi Sawah	Rp. 4.250.000

Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Permisan (2024)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa kegiatan Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan sudah berjalan. Saat ini program ketahanan pangan di Desa Permisan fokus pada pembangunan infrastruktur pangan untuk mendukung kegiatan program ketahanan pangan. Di Desa Permisan, Kecamatan jabon, adanya program ketahanan pangan bisa memberikan akses masyarakat desa pada kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang dapat memberikan dukungan agar mereka layak untuk bertani dan memberikan pangan yang mereka butuhkan. Di daerah perdesaan, ketidakstabilan pangan dapat mengakibatkan program ketahanan pangan tidak tercukupi. Program ketahanan pangan di Desa

Permisan berupaya memberdayakan masyarakat perdesaan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya mereka secara efektif sekaligus mencapai kemandirian pangan bagi rumah tangga dan masyarakat.

Implementasi adalah segala upaya yang dilakukan, baik itu individu maupun kelompok di dalam pemerintah ataupun swasta, yang ditujukan pada terwujudnya tujuan-tujuan yang telah atau sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Nurzaman et al., 2009). (Agustino, 2016) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan adalah proses mengubah peraturan menjadi tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks bahkan seringkali berdampak pada politik karena adanya intervensi berbagai kepentingan”. Menurut Edwards III, ada empat faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan, antara lain (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Artinya apabila keempat faktor tersebut tidak terpenuhi, maka kebijakan publik tidak akan terlaksana secara efektif.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vera, N (2021) dengan judul "Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur". Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan dengan baik karena kondisi Dinas Ketahanan Pangan yang belum maksimal dalam melaksanakan tupoksinya. Masih ada tantangan yang dihadapi program lumbung pangan, seperti kurang aktifnya lumbung pangan akibat kurangnya dana operasional program. Terakhir, program toko petani belum berfungsi sebagai pasar karena menurut penelitian, banyak toko petani yang tetap beroperasi di rumah pribadi milik PPL. Selain itu kendala lainnya adalah kurangnya minat masyarakat terhadap Toko Tani tersebut (Natalia Vera, 2021).

Kedua pada penelitian yang dilakukan oleh Rio S, dkk (2023) yang berjudul "Implementasi Program Ketahanan Pangan". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan

bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan Tanaman Padi di Kecamatan Benai masih mengalami permasalahan. Tidak semua petani padi mendapatkan manfaat dari peningkatan komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Selanjutnya, sumber daya yang terkait dengan sumber daya manusia dan fasilitas belum dimanfaatkan sepenuhnya. Disposisi dan sikap pelaksana belum optimal, proses pengurangan kebijakan disposisi berjalan lamban. Dan terakhir, adanya struktur birokrasi, yang berarti bahwa petani harus melewati banyak tahapan sebelum dapat melaksanakan rencana mereka di lapangan (Setiawan et al., 2023).

Ketiga pada penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti D (2024) yang berjudul "Implementasi Program Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Program ketahanan pangan di Desa Tropodo belum berjalan optimal dikarenakan masih ada beberapa kendala yakni pada sumber daya manusia dimana Pemerintah Desa kurang melakukan sosialisasi tentang program ketahanan pangan sehingga masyarakat yang tinggal di sana masih ada yang belum mengetahui adanya program tersebut. Lalu, Pemerintah Desa juga belum mengkomunikasikan antar warga mengenai program ketahanan pangan ini (Ariyanti et al., 2024).

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti menemukan beberapa masalah dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon, yakni pada sumber daya manusia dimana petani merupakan pelaku yang menjadi titik tolak keberhasilan dari Program Ketahanan Pangan. Mayoritas petani di Desa Permisan berusia lanjut sehingga pengetahuan serta keterampilan ini menghambat adaptasi inovasi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas. Faktor usia juga berdampak pada pola pikir petani yang kurang maju seperti kebiasaan bertani tradisional yang sulit diubah, dan minimnya akses terhadap informasi dan edukasi. Tingginya sikap individualisme juga menjadi permasalahan, hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi aktif. Hal tersebut

mengakibatkan pengetahuan dan pengalaman yang seharusnya dapat dibagi secara bersama menjadi pada individu-individu tertentu saja. Hal ini menyebabkan program ketahanan pangan di Desa Permisan akan sulit untuk berjalan dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun, maka peneliti tertarik untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan dengan judul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon”. Manfaat penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai program ketahanan pangan di Desa Permisan. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon dalam meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang aman, bergizi, dan cukup bagi seluruh masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti memberikan gambaran tentang Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon secara rinci dengan bentuk tulisan, gambar, kata dan kalimat. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif berusaha menjelaskan secara rinci gejala sosial. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam metode penelitian kualitatif, yang digunakan untuk mempelajari hal-hal yang bersifat alamiah. Triangulasi digunakan dalam teknik pengumpulan data, dan analisis induktif digunakan untuk menekankan makna daripada generalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi segala sesuatu yang terjadi secara sistematis dan berurutan (Sugiyono, 2014).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel dipilih berdasarkan informasi dan tentunya

melalui pertimbangan. Dalam penelitian ini sebagai informannya adalah Ibu Verikah Dwi Windari selaku Kaur Perencanaan. Peneliti menggunakan metode analisis oleh interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Membuat Kesimpulan. Lokasi penelitian terletak di Desa Permisan Kecamatan Jabon. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara untuk pengumpulan data primer, dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon berdasarkan teori menurut Edwards III, ada empat variabel yang mempengaruhi Implementasi kebijakan, antara lain (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, kemudian peneliti dapat menjelaskan mengenai hasil wawancara oleh informan penelitian dan observasi di lapangan mengenai Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon dengan mengacu pada indikator sebagai berikut :

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan adanya komunikasi, informasi mengenai kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak atau para pelaksana yang terlibat, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi memiliki peran dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon. Dengan menerapkan komunikasi yang jelas dan mudah dimengerti, serta memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pelaksana agar informasi yang disampaikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Berikut penyebaran informasi dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Verikah Dwi Windari selaku kaur perencanaan di Desa Permisan, beliau

menyampaikan bahwa :

“Ada ditahun 2023, bimteknya terkait dengan pengenalan varietas padi, biji padi, pokoknya biji padi unggulan. Jadi istilahnya panennya lebih cepat, bijinya juga berisi. Selain infrastruktur dibenahi, petani juga diberikan wawasan terkait jenis tanaman yang akan ditanam, teknik pemberantasan hama dan pemberian pupuk yang efektif. Biasanya setahun itu ada bimtek, tergantung kebutuhan sih sebenarnya karna kemarin kita juga ada kegiatan ketahanan pangan dari dinas pangan dan pertanian yakni tentang pengolahan sampah organik untuk pupuk rumah tangga terus penanaman hidroponik. Kan programnya tidak hanya dari APBD saja, ada yang dari dinas bisa masuk ke Desa itu masuk di RKPD daerah. Kita mendatangkan narasumber dari penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian itu sudah terbiasa mendampingi petani, jadi bahasanya mudah dikenal, mudah dipahami.”
(Wawancara 13 Agustus 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon dalam penyampaian informasi kepada para petani melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) atau sosialisasi. Kegiatan ini mampu memberikan informasi dan wawasan kepada para petani karena penyampaian informasinya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini memungkinkan petani dari berbagai latar belakang pendidikan untuk menyerap materi dengan baik dan menerapkannya. Selain itu, bimtek atau sosialisasi juga membuat para petani berinteraksi dan bertukar pengalaman. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vera N dengan judul Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan dalam waktu kurang lebih dua tahun berjalan cukup sukses. Terdapat koordinasi komunikasi internal yang sangat baik antar anggota di setiap divisi Dinas Ketahanan Pangan.

Dengan demikian, komunikasi yang efektif dalam program

ketahanan pangan ini dapat menjadi kunci dalam mewujudkan keberhasilan program ketahanan pangan. Menurut Edward III, suatu arahan atau perintah dalam melaksanakan kebijakan publik harus jelas dan konsisten. Para pelaksana bisa jadi tidak paham jika instruksinya tidak jelas. Agar pelaksana kebijakan dapat memahami tujuan dan kebijakan secara efektif, diperlukan konsistensi dan kesamaan antara sasaran dan tujuan kebijakan. Maka pada indikator komunikasi ini bisa dikatakan sudah terlaksana dengan baik.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen yang sangat penting dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Permisan yang harus disediakan agar program tersebut berhasil dan mencapai tujuannya. Edwards III mengatakan bahwa memiliki sumber daya yang tepat sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Adapun jenis sumber daya yang harus dipenuhi dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa permisan yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana prasarana. Berikut hasil wawancara bersama Ibu Verikah Dwi Windari selaku kaur perencanaan di Desa Permisan, beliau menyampaikan :

“Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ini, sumber daya manusianya ada gapoktan tani makmur yang mengurus sawah dan kelompok tani tambak berkah itu yang mengelola budidaya kolam ikan mujair nila dan udang. Nah permasalahannya disini dipoktannya. Jadi para petani kan banyak yang sudah tua dan yang aktif itu hanya beberapa. Jadi mereka masih individualisme, kalau sawahnya sudah selesai sudah beres itu udah nggak lihat sekelilingnya. Misalnya dari pemdes ndak memperhatikan hanya diberi anggaran saja ya mangkrak. Untuk penggunaan anggarannya sudah efektif dan efisien, misalnya kita kan menganggarkan 20% yawes dimaksimalkan 20% itu. Misalnya ada yang tanya kok bangun ini bangun itu, itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan petani atas permintaan petani ndak asal menentukan mana yang harus dibangun atau mana yang harus diberdayakan. Untuk gaji itu ndak ada karna inikan swadaya. Kalau sarpras juga insyaallah sudah memadai.”

(Wawancara 13 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada sumber daya manusia yang ada masih kurang mendukung, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat individualisme yang menyebabkan kurangnya partisipasi aktif. Hal tersebut mengakibatkan pengetahuan dan pengalaman yang seharusnya dapat dibagi secara bersama menjadi pada individu-individu tertentu saja. Selain individualisme, faktor usia juga menjadi permasalahan. Banyak petani yang sudah lanjut usia dan kurang memiliki akses terhadap teknologi pertanian modern. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan ini menghambat adaptasi inovasi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas. Maka hal ini belum dapat berjalan dengan baik karena belum ada yang mengendalikan dengan tepat. Kelompok tani tambak berkah yang mengelola budidaya kolam ikan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Susunan Pengurus Kelompok Tani Di Desa Permisan

No.	Nama	Jabatan
1.	Nastain	Ketua
2.	Yasin	Sekretaris
3.	M. Amin Bisri	Bendahara
4.	Asnawi	Anggota
5.	Mistam	Anggota
Bidang Kegiatan : Budidaya Mujair Nila dan Udang		

Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Permisan (2024)

Lalu pada sumber daya finansial, ini sangat dibutuhkan bagi program ketahanan pangan dimana sumber daya finansial ini akan mendukung berjalannya program tersebut. Anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan program ketahanan pangan sudah tersedia anggaran khusus yang diturunkan oleh pemerintah pusat sebesar 20% dari APBD. Pemerintah Desa Permisan sudah memaksimalkan penggunaan anggaran ketahanan pangan guna memenuhi permintaan dan kebutuhan para petani untuk menunjang

program ketahanan pangan. Anggaran untuk program ketahanan pangan di Desa Permisan bisa dilihat pada Tabel 4:

Tabel 4. Anggaran Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan

Tahun	Anggaran
2022	Rp. 158.742.000
2023	Rp. 201.183.000
2024	Rp. 169.250.000

Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Permisan (2024)

Pada sumber daya sarana prasarana, ketersediaan sarana dalam suatu program sangat diperlukan. Sarana merupakan aspek yang memberikan bantuan di belakang layar untuk mendukung aktivitas suatu program. Sedangkan prasarana mengacu pada bagian-bagian yang digunakan untuk menyelesaikan aktivitas yang sedang berlangsung. Pencapaian optimal dari tujuan-tujuan ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya sarana. Fasilitas fisik adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah tercapai, sedangkan prasarana merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Mengenai fasilitas dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan Di Desa Permisan sudah cukup memadai bisa dilihat pada Tabel 5 :

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Program Ketahanan Pangan

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Rumah pompa	2 unit
Kolam ikan	3 unit
Kolam pembibitan	1 unit
Toilet	1 unit
Tempat penampungan pakan ikan	1 unit
Gazebo	1 unit

Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Permisan (2024)

Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon pada sumber daya yang ada bisa dikatakan cukup baik, terutama pada sumber daya finansial dan sumber daya sarana

prasarana. Penggunaan anggaran sudah dimaksimalkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kegiatan-kegiatan program ketahanan pangan. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga sudah cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan program. Namun, terdapat beberapa kekurangan pada sumber daya manusia. Banyak petani yang sudah berusia lanjut sehingga pengetahuan dan pemahaman mereka terbatas serta masih ada sikap individualisme yang menghambat pelaksanaan program ini. Kurangnya keberanian untuk menyampaikan pendapat juga menjadi kendala dalam pengembangan berjalannya program ketahanan pangan. Hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti D dengan judul Implementasi Program Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). Terkait sumber daya dalam program ketahanan pangan di Desa Tropodo, masih terdapat kesulitan pada sebagian besar sumber daya manusia dimana pemerintah desa belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang program ketahanan pangan sehingga mereka kurang mengetahui adanya program tersebut. Saat ini, tidak ada kendala signifikan pada infrastruktur atau sumber daya finansial.

Jika sumber daya yang tersedia tidak memadai, maka program akan sulit untuk berjalan dengan baik. Edward III menyebutkan bahwa ketersediaan dan kualitas sumber daya sangat menentukan keberhasilan suatu program (Daming, M et al., 2021). Jadi pada indikator sumber daya dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon belum berjalan dengan baik.

3) Disposisi

Disposisi dipengaruhi oleh tiga faktor antara lain pemahaman terhadap kebijakan, reaksi terhadap kebijakan, dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki keinginan dan komitmen untuk melaksanakan program ketahanan

pangan di Desa Permisan sama pentingnya dengan pembelajaran dan kesadaran akan tanggung jawab utamanya. Menurut Edwards III, sikap atau disposisi pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilannya. Sikap pelaksana kebijakan dapat menimbulkan hambatan yang signifikan jika pelaksana kebijakan tidak mematuhi arahan kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Verikah Dwi Windari selaku kaur perencanaan di Desa Permisan :

“Untuk tumpang tindih tugas itu tidak ada, cuman itu tadi ndak pede dalam mengambil keputusan. Banyak yang tua-tua juga jadi untuk bersuara itu ndak berani. Kalau bicara mengenai manfaatnya bagi masyarakat ya belum terlihat sih sekarangkan masih proses. Jadi misalnya sekarang pake ketahanan pangan hidroponik, kita latih masyarakat hidroponik. Alat sudah tersedia, teknik sudah diajari, semua fasilitas dipenuhi terus masyarakatnya kalau ndak memanfaatkan ya nggak terlihat. Jadi poinnya disitu, kayak kolam kemarin manfaatnya masih belum terasa. Kita pada saat panen istilahnya antara modal sama penjualan itu sudah fix terus ada sisa banyak itu bisa kita bagi-bagikan ke masyarakat, tapi masih sangat kecil presentasinya. Jadi masih belum bisa merasakan seluruhnya. Nah program ketahanan pangan inikan kita lebih banyak tergantung sama alam, alam sama kemampuan manusia untuk mengolah, jadi kalo ndak saling sabar dan saling mendukung ya ndak bisa. Kendala kita selain di poktannya itu ya perubahan cuaca sih perubahan iklim, tahun lalu bulan agustus september kita itu masih melimpah airnya. Sekarang sudah ndak ada sama sekali.” (Wawancara 13 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pada indikator Disposisi dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan manfaat langsung dari program ketahanan pangan bagi masyarakat masih belum terlihat secara signifikan. Hal ini karena program ketahanan pangan di Desa Permisan masih dalam proses. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk merasakan manfaatnya, terutama dalam hal peningkatan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani.

Selain itu, faktor perubahan iklim juga berpengaruh dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ini. Meskipun demikian untuk pelaksanaan tugas-tugasnya tidak ada tumpang tindih. Tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas ini memungkinkan setiap petani/poktan untuk fokus pada kegiatan yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti D dengan judul Implementasi Program Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat dari adanya program ketahanan pangan ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya keseimbangan perekonomian masyarakat Desa Tropodo yang secara tidak langsung berhasil membantu pemulihan perekonomian yang terpuruk. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat wabah Covid-19 dapat memperoleh manfaat dari program ketahanan pangan ini. Oleh karena itu, melalui program ini, pemerintah Desa Tropodo memberikan pekerjaan kepada masyarakat agar mereka dapat mulai bekerja kembali dan berkontribusi dalam pengembangan program ketahanan pangan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu unsur implementasi yang memiliki sifat kompleks dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut. Struktur birokrasi memuat dua unsur yaitu fragmentasi/tanggung jawab dan Standart Operasional Prosedur (SOP). Struktur ini dapat menyebabkan pelaksanaan program menjadi kurang ideal dan tidak optimal jika tidak ada penyelesaian atau kerjasama. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon, jika pelaksanaannya tidak ada ketertiban, maka dapat menghambat tercapainya tujuan program. Langkah-langkah mendasar dari Standart Operasional Prosedur (SOP) biasanya digunakan untuk

menghentikan pelaksanaan program yang berakibat fatal. Agar lebih fleksibel dan sejalan dengan tujuan pelaksanaan program, maka prosedur harus sesuai dengan prosedur perencanaan, mudah dipahami, dan mempunyai dampak besar terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Permisian, Kecamatan Jabon. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Verikah Dwi Windari selaku kaur perencanaan di Desa Permisian, beliau menyampaikan bahwa :

“SOPnya kita hanya melaksanakan berdasarkan peraturan menteri Desa, acuannya disitu. Kalau SOP pasti ya PERMENDES PDPT tentang ketahanan pangan. Kayak gini, sekarang kan lagi paceklik kesulitan air. Kalau solusinya ya sebenarnya sama stakeholder terkait. Jadi kan kekurangan air itu ndak hanya di jabon hampir merata di jawa timur seluruh kabupaten. Para stakeholder pemegang wilayah ini juga berperan, seperti DPUBM SDA. DPUBM SDA itu terkait dengan normalisasi avur. Infrastruktur sungai, normalisasi sungai, tatanan infrastruktur sungai, itu yang harus dibenahi. Jadi perlu kerjasama antar stakeholder. Karena kan rata-rata yang saya tau yang saya lihat kan dinas pangan, DPUBM SDA itu jalan sendiri-sendiri. Cuman mungkin ya antar stakeholder itu masih nyimpen datanya masing-masing, jadi datanya dirangkul sendiri.” (Wawancara 13 Agustus 2024)

Pada Implementasi program ketahanan pangan di Desa Permisian sangat bergantung pada kekuatan struktur birokrasi yang mendukungnya. Salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi adalah Standart Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur. Dalam melaksanakan program ketahanan pangan, Desa Permisian mengacu pada PERMENDES PDPT tentang ketahanan pangan. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah. Dengan demikian, setiap petani/poktan dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan program ketahanan pangan ini. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vera N dengan judul Implementasi Program Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur telah sesuai dengan arahan pimpinan yang ditetapkan dengan menggunakan SOP. Implementasi Program Ketahanan Pangan ini menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur Dinas Ketahanan Pangan sudah ada lengkap dengan petunjuk teknisnya (Juknis).

Keberhasilan implementasi program ketahanan pangan juga sangat bergantung pada koordinasi antar stakeholder yang terlibat. Namun, koordinasi antar stakeholder yang terlibat belum berjalan dengan baik, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pengelolaan data yang belum terpusat. Masing-masing pihak masih menyimpan data secara mandiri, sehingga sulit untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program. Akibatnya, sulit untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Menurut Edward III struktur birokrasi yang baik akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur yang jelas, aturan yang efektif, dan koordinasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan program. Jadi pada indikator struktur birokrasi dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Permisian Kecamatan Jabon bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik.

D. SIMPULAN

Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisian Kecamatan Jabon dapat disimpulkan yakni: 1) Komunikasi sudah berjalan cukup baik, penyampaian informasi kepada para petani yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) atau sosialisasi. 2) Sumber daya, sumber daya manusia belum sepenuhnya berjalan lancar karena banyaknya petani yang sudah berusia lanjut sehingga pengetahuan dan pemahaman mereka terbatas serta masih ada sikap individualisme yang menghambat pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa permisan. Selain sumber daya manusia ada sumber daya finansial, untuk penggunaan

anggaran sudah dimaksimalkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kegiatan-kegiatan program ketahanan pangan. Lalu, untuk sumber daya sarana prasarana yang tersedia sudah cukup memadai. 3) Dari segi disposisi belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari manfaat langsung dari program ketahanan pangan bagi masyarakat belum terlihat secara signifikan. 4) Pada struktur birokrasi, sudah ada SOP yang jelas namun koordinasi antar stakeholder yang terlibat belum berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2016). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 18. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/3104>
- Ariyanti, D., Sukmana, H., Studi, P., & Publik, A. (2024). Implementasi Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) [Implementation Of Food Security (Case Study Of Tropodo Village, Krian District, Sidoarjo Regency)]. 1–11.
- Daming, M., Agustang, A., Idkhan, A, M., R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1475–1481. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2580/http>
- Encang Saepudin, Ninis Agustini Damayani, dan A. B. (2018). Participation of communities toward the village food independent program in Bandung regency. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(1), 86–94.
- Fiandana, Y., Makmur, M., & Hanafi, I. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah (Studi pada Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(10), 1792–1796.
- Lamingthon, N. (2012). Implementasi Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Sambirejo Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi*, 1(1), 27–40. <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/5%0Ahttps://ejo>

urnal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/download/5/2

- Natalia Vera. (2021). Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 23–31. <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i1.1129>
- Nurzaman, D., Vestikowati, E., Sujai, I., Galuh, U., Parkir, R., & Nomor, D. U. (2009). Jalan Umum Dalam Pencapaian Target Retribusi. 2940–2952.
- PDDT 2022. (2023). Pedoman Program Ketahanan Pangan. Redaksi. <https://bakom-darma.metaDesa.id/artikel/2023/11/24/pedoman-program-ketahanan-pangan#>
- Setiawan, R., Rusli, Z., & Mayarni, M. (2023). Implementasi Program Ketahanan Pangan. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.723>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta.
- Tri P, D. J. (2016). Implementasi Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *EJournal Universitas Negeri Semarang*, 18, 1–9. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14053>
- Tri Susuilo. (2023). Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) Indonesia. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230126081433-128-408319/soal-ketahanan-pangan-indonesia-berada-di-urutan-69-dunia>